



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH
Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7-8 Jakarta 10110 Telp. (021) 345327
Fax. (021) 345327 www.kemendagri.go.id

NOTA-DINAS

Kepada : Yth. Bapak Direktur Jenderal Otonomi Daerah
 : melalui Sekretaris Direktorat Jenderal Otonomi Daerah
Dari : Direktur Produk Hukum Daerah
Nomor : 2536/PHD/SD I/XII/2025
Tanggal : 22 Desember 2025
Sifat :
Lampiran :
Hal : Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Tengah
tentang Tugas dan Wewenang Majelis Rakyat Papua.

Berkenaan dengan surat Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah Nomor: 100.3.2/1732/SET tanggal 28 November 2025 Hal Surat Permohonan Fasilitasi Ranperdasus tentang Tugas dan Wewenang Majelis Rakyat Papua, dengan hormat bersama ini dilaporkan hal-hal sebagai berikut:

1. Permohonan Fasilitasi tersebut disampaikan melalui aplikasi ePerda dengan nomor register J8PQBA tanggal 28 November 2025.
2. Berdasarkan ketentuan Pasal 88 ayat (1) dan Pasal 89 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, bahwa “Pembinaan terhadap rancangan produk hukum daerah berbentuk peraturan di provinsi dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah” dan “Pembinaan dilakukan dalam bentuk fasilitasi terhadap rancangan peraturan daerah, rancangan peraturan kepala daerah dan rancangan peraturan DPRD sebelum ditetapkan”.
3. Mengingat hal tersebut, Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah menyampaikan Rancangan Tugas dan Wewenang Majelis Rakyat Papua untuk dilakukan fasilitasi.
4. Rancangan Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Tengah dimaksud telah dilakukan pendalaman dan penajaman baik dari dari aspek yuridis formal dan materiil serta telah mengikuti standar rancangan peraturan gubernur sejenis yang pernah difasilitasi Direktorat Produk Hukum Daerah, Ditjen Otda.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, bersama ini terlampir kami siapkan Net Konsep Surat Menteri Dalam Negeri Kepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung untuk mohon persetujuan dan tandatangan.

Demikian untuk menjadi periksa dan mohon petunjuk lebih lanjut.

Direktur Produk Hukum Daerah

